

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah proses bimbingan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.¹

Pendidikan merupakan bagian integral dalam pembangunan dan merupakan kebutuhan serta tuntutan yang sangat penting untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Proses pendidikan tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan itu sendiri. Pembangunan diarahkan dan bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, dan pembangunan sektor ekonomi yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan berlangsung dengan berbarengan.

Pendidikan bagi bangsa yang sedang berkembang seperti bangsa Indonesia saat ini merupakan kebutuhan mutlak yang harus dikembangkan sejalan dengan tuntutan pembangunan secara tahap demi tahap. Pendidikan yang dikelola dengan tertib, teratur, efektif, dan efisien (berdaya guna dan berhasil guna) akan mampu mempercepat jalannya proses pembudayaan bangsa yang berdasar pokok pada penciptaan kesejahteraan umum dan pencerdasan kehidupan

¹ Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hal 3

bangsa kita, sesuai dengan tujuan nasional seperti dalam alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.²

Untuk itu dunia pendidikan dituntut untuk membuat ketentuan-ketentuan format pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman, relevan dengan kehidupan nyata yang memiliki ciri berubah. Begitupun dengan pendidikan agama islam tidak lepas dari usaha pencarian format baru yang dapat meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, baik yang berkenaan dengan aspek eksternal (sistem pendidikan) maupun yang berhubungan dengan aspek internal yakni pola pikir, sikap dan perilaku dari masing-masing peserta didik. Untuk itu pendidikan agama islam juga perlu mendapatkan perhatian yang khusus dari pengelola pendidikan, karena pendidikan agama islam itu sendiri merupakan bagian dari pendidikan pada umumnya. Ini bisa dilihat dari tujuan Pendidikan Agama Islam, yang mana pada hakekatnya terfokus pada tiga bagian, yaitu:

- 1) Terbentuknya *insan kamil* yang mempunyai wajah-wajah qur'ani, misalnya wajah kekeluargaan dan persaudaraan yang dapat menimbulkan sikap egalitarianisme.
- 2) Terciptanya *insan kaffah* yang memiliki dimensi-dimensi religious, budaya dan ilmiah sekaligus penyandaran manusia sebagai hamba khalifah Allah.
- 3) Terbentuknya *warosatul anbiya'*.³

² Fuad Ihsan, *Dasar-dasar Kependidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hal 3-4

³ Muhaimin, Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian Filosofis Dan Kerangka Dasar Operasionalnya*, (Bandung: Trigenda Karya, 1993), hal 164-166

Dan ini relevan dengan tujuan pendidikan nasional, sebagaimana yang termaktub dalam undang-undang No 2 tahun 1989 tentang system pendidikan nasional, BAB II Pasal 4 dinyatakan :

Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kepribadian mantap dan mandiri, serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.⁴

Untuk mencapai terselenggaranya pendidikan yang bermutu, dikenal dengan perlunya paradigma baru pendidikan yang difokuskan pada otonomi, akuntabilitas, akreditasi dan evaluasi. Keempat pilar manajemen ini diharapkan pada akhirnya mampu mendukung terwujudnya *good governance*. *Good governance* merupakan konsep tentang tatanan pemerintah yang baik, tidak terlepas dari peranan pendidikan. Terwujudnya *good governance* dalam kehidupan bernegara merupakan refleksi dari kondisi masyarakat yang mendukung terlaksananya *good governance*. Kondisi suatu masyarakat yang siap dan mendukung itu tidak terlepas pula dari budaya yang ada dalam masyarakat dan sangat sesuai dengan konsep tentang *good governance*, sedangkan budaya masyarakat berkembang karena adanya pendidikan.⁵

⁴ UU RI No.20 Th 2003, *Tentang System Pendidikan Nasional Dan Penjelasannya*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1992), hal 4

⁵ Ali Maksum, Luluk Yunan Ruhendi, *Paradigma Pendidikan Universal Di Era Modern dan Post Modern*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2004), hal 234

Pada dasarnya konsep *good governance* bertumpu pada konsep system pemerintahan yang demokratis.⁶ Implementasi *good governance* seperti yang dikemukakan di atas, harus didukung oleh kultur masyarakat yang mendukung konsep itu. Pendidikan merupakan salah satu wujud kultur yang berkembang dalam masyarakat, dan dari pendidikan pula akan melahirkan kultur yang terjadi di masyarakat. Sehingga ada hubungan dialektika antara pendidikan dan kultur. Di sinilah letak penting pendidikan dalam menciptakan kultur yang mendukung ide *good governance* tersebut, Karena antara pendidikan dan kebudayaan terdapat hal yang saling terkait.⁷

Adapun pengertian otonomi dalam pendidikan belum sepenuhnya mendapatkan kesepakatan pengertian dan implementasinya. Tetapi paling tidak, dapat dimengerti sebagai bentuk pendelegasian kewenangan seperti dalam penerimaan dan pengelolaan peserta didik dan staf pengajar/ staf non akademik, pengembangan kurikulum dan materi ajar, serta penentuan standar akademik. Dalam penerapannya di sekolah, misalnya paling tidak guru/pengajar semestinya diberikan hak-hak profesi yang mempunyai otoritas di kelas, dan tak sekedar sebagai bagian kepanjangan tangan birokrasi di atasnya.

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang memuaskan. Akuntabilitas menuntut kesepadanan antara

⁶ *Ibid.*, hal 235

⁷ *Ibid.*, hal 237

tujuan lembaga pendidikan Islam tersebut dengan kenyataan dalam hal norma, etika dan nilai termasuk semua program dan kegiatan yang dilaksanakannya.

Adapun dalam membina dan mengembangkan lembaga pendidikan Islam, pemerintah melakukan berbagai macam cara, seperti dengan memberikan subsidi keuangan, tenaga guru yang di gaji pemerintah (guru negeri), mengadakan penataran untuk pengurus dan guru. Demikian pula pemberian bantuan berupa alat-alat keterampilan, keuangan dan sebagainya.⁸

Berangkat dari hal tersebut diatas, yang mana setiap lembaga apalagi ini merupakan lembaga pendidikan Islam sudah tentu mempunyai tujuan. Agar tujuan itu dapat tercapai, maka perlu bahkan harus ada pengelolaan di segala bidang, baik di bidang keuangan, personalia, pengelolaan buku-buku yang di miliki, bidang kurikulum dan sebagainya. Semua itu perlu adanya keseriusan dan kehati-hatian dalam artian tidak asal-asalan dalam mengelolanya. Oleh karena itu sangat dibutuhkan pengelola yang profesional. Jadi menurut penulis bahwa berhasil tidaknya lembaga pendidikan dalam mencapai tujuannya itu ditentukan oleh pengelolaannya.

Usaha menghasilkan pendidikan yang bermutu dalam konteks mewujudkan *good governance*, secara umum kita kenal ada tiga pilar pokok yang mendukung kemampuan suatu bangsa dalam melaksanakan *good governance*, yakni pemerintah (*the state*), masyarakat adab, masyarakat madani, masyarakat

⁸ Zuhairini dkk, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), hal 198

sipil (*civil society*). Penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan yang baik dan bertanggung jawab baru tercapai bila dalam penerapan otoritas politik, ekonomi dan administrasi memiliki jaringan dan interaksi yang setara. Interaksi dan kemitraan seperti itu biasanya baru dapat berkembang subur bila ada kepercayaan (*trust*), transparansi, partisipasi, serta tata aturan yang jelas dan pasti.⁹

Dengan memperhatikan keadaan di atas, kiranya perlu diteliti dan dikaji keberhasilan program peningkatan pendidikan dengan meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip *good governance*.

Berdasarkan hal tersebut penulis terdorong untuk membahas masalah tersebut dengan menyusun skripsi yang berjudul : PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DI SMA MUHAMMADIYAH 3 SURABAYA.

B. Rumusan Masalah

Pada perumusan masalah ini akan dikemukakan dalam bentuk pertanyaan mendasar yang akan dicari jawabannya dalam penelitian nanti. Adapun rumusan masalah tersebut adalah :

⁹ [www. Good Governance. com](http://www.GoodGovernance.com)

1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam di SMA Muhammadiyah 3 Surabaya?
2. Adakah kendala di dalam menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam di SMA Muhammadiyah 3 Surabaya?
3. Bagaimana dampak *good governance* terhadap pengelolaan lembaga pendidikan Islam di SMA Muhammadiyah 3 Surabaya?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam di SMA Muhammadiyah 3 Surabaya
2. Untuk mengetahui ada tidaknya kendala di dalam menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam di SMA Muhammadiyah 3 Surabaya
3. Untuk mengetahui dampak *good governance* terhadap pengelolaan lembaga pendidikan Islam di SMA Muhammadiyah 3 Surabaya

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat yang baik bagi peneliti, pihak IAIN Sunan Ampel Surabaya, praktisi, pengelola pendidikan dan masyarakat pada umumnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

- a. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang pendidikan Islam yang mengacu kepada realitas empiris
- b. Sebagai modal dasar penelitian pendidikan pada tataran lebih lanjut

2. Bagi Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

- a. Sebagai interdisipliner keilmuan mahasiswa dalam bidang pendidikan
- b. Untuk menambah perbendaharaan kepustakaan tarbiyah

3. Bagi Praktisi Pendidikan

Menjadi bahan pijakan dalam merumuskan konsep atau format pendidikan yang mengacu pada realitas yang berkembang di tengah-tengah masyarakat

4. Bagi Pengelola Pendidikan

- a. Terciptanya pola pendidikan yang sesuai dengan agama Islam
- b. Menjadi bahan masukan dalam merumuskan konsep atau format pendidikan yang memahami realitas, sosio-kultur di tengah pendidikan.

5. Bagi Masyarakat

- a. Untuk menciptakan tatanan masyarakat yang sadar akan pentingnya pendidikan Islam
- b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi lapisan masyarakat sebagai wawasan pengetahuan pendidikan yang memanusiakan manusia
- c. Adanya interaksi yang sehat antara masyarakat mayoritas dan minoritas dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dan menghindari salah pengertian serta mempertegas ruang lingkup pembahasan, maka penulis memandang perlu menyampaikan batasan-batasan terhadap beberapa istilah yang terdapat dalam judul di atas. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan antara lain :

1. Penerapan : Pelaksanaan, penerapan adalah perihal mempraktekkan teori.¹⁰
2. Prinsip : Asas, pokok, penting.¹¹
3. *Good Governance* : Tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan.¹²
4. Pengelolaan : Ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan.¹³
5. Lembaga : yayasan yang bergerak dalam bidang penyelenggaraan pendidikan, kemasyarakatan.¹⁴
6. Pendidikan Agama Islam : Usaha sadar, yakni suatu kegiatan bimbingan, dan pengajaran dan atau latihan yang dilakukan secara berencana dan sadar atas tujuan yang hendak dicapai.¹⁵

¹⁰ Departemen P & K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi II*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hal 1044

¹¹ Pius A Partanto, M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), hal 625

¹² Dede Rosyada, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000), hal 180

¹³ Drs. H. Martinis Yamin, Dra. Maisah, *Manajemen Pembelajaran Kelas*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), hal 34

¹⁴ Pius A Partanto, M. Dahlan Al Barry, *Op.Cit*, hal 406

¹⁵ Muhaimin, 2001, *Paradigma Pendidikan Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2004), hal 76.

Pendidikan agama Islam bertujuan untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹⁶

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan suatu kegiatan untuk mencari, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya¹⁷.

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan diarahkan pada latar dan individu tersebut secara *holistik* (utuh). Jadi, dalam hal ini individu atau organisasi tidak diisolasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi dipandang sebagai bagian dari suatu keutuhan.¹⁸

Penelitian ini memilih pendekatan penelitian kualitatif dikarenakan permasalahan penelitian bersifat holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna. Serta peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola dan teori.

¹⁶ *Ibid.*, hal 78

¹⁷ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara: 2004), hal

1

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1996),

2. Jenis Data

Adapun jenis data yang dipakai oleh peneliti untuk mendapatkan sebuah data yang penting dan dapat menjembatani, yaitu sebagai berikut:

a. Field Research

Yaitu mengumpulkan data-data dengan jalan meneliti langsung ke objek yang bersangkutan (turun lapangan) untuk memperoleh dan mengumpulkan data-data yang diperlukan. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.

Penelitian lapangan yakni mengadakan riset lapangan tempat penulis mengadakan penelitian tersebut dengan tujuan memperoleh data secara kongkrit.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data merupakan upaya peneliti dalam mengumpulkan data yang diperoleh di lapangan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode dalam mengumpulkan data, sebagai berikut :

a. Metode Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang nampak pada obyek penelitian.¹⁹

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal 120.

Dalam metode observasi ini, peneliti menggunakan teknik observasi partisipatif atau partisipan artinya peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian, sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya.²⁰

Metode observasi ini digunakan untuk mencari data tentang penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam guna menghasilkan pendidikan yang bermutu.

b. Metode wawancara (*interview*)

Metode wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal.²¹ Dalam artian bahwa metode ini berbentuk tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.²²

Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data tentang penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam di SMA Muhammadiyah 3 Surabaya. Interview ini dilakukan oleh peneliti dengan kepala sekolah, dan tenaga kependidikan yang dapat menunjang pelaksanaan penelitian.

²⁰ Sugiyono, *Metode.....*, hal 310.

²¹ S. Nasution, *Metode Research*, (Bandung: Bumi Aksara, 1996), hal 133.

²² Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal 94.

c. Metode dokumentasi.

Metode dokumentasi adalah kegiatan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.²³

Metode dokumentasi digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data, jumlah keseluruhan peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan di samping juga letak geografis, peta-peta, foto-foto kegiatan, data inventaris terhadap pemenuhan-pemenuhan kebutuhan material dalam mengajar seperti alat bantu, poster, dan wujud lain yang diperlukan untuk menunjang kejelasan obyek penelitian.

4. Tehnik Analisis Data

Analisa data secara umum di lakukan dengan cara menghubungkan apa yang di peroleh dari suatu proses kerja awal. Hal ini di tujukan untuk memahami data yang terkumpul dari sumber, yang kemudian untuk di ketahui kerangka berfikir peneliti.

Adapun teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif analisis, karena data yang diperoleh dalam penelitian ini lebih banyak bersifat kualitatif, maka dengan sendirinya dalam penganalisaan data-data penulis lebih banyak menganalisa.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur...* hal 206.

Penelitian deskriptif bertujuan untuk pemecahan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi.²⁴ Metode analisa data yang digunakan adalah:

Analisa Kualitatif

Analisa kualitatif dilakukan terhadap data baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif. Data kualitatif di kemukakan dalam bentuk kalimat sehingga nantinya dapat diambil kesimpulan. Yang dianalisa adalah data tentang penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam di SMA Muhammadiyah 3 Surabaya yang bersumber dari observasi, wawancara dan dokumentasi.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang skripsi ini, maka penulis akan memaperkan dalam sistematika pembahasan yang terdiri atas 5 bab, yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah yang mendorong penulis untuk membahas masalah penelitian yang penulis rumuskan dalam suatu rumusan masalah. Dengan demikian penulis mengharapkan dapat

²⁴ Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, *Metodologi...*, hal 44

diketahuinya tujuan dan kegunaan penelitian kemudian mencakup pula ruang lingkup pembahasan, serta ditutup dengan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORI

Hal ini penulis menguraikan landasan teoritis mengenai gambaran umum tentang pengertian serta prinsip-prinsip *good governance* dan gambaran pengelolaan lembaga pendidikan Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis memaparkan data dan hasil penelitian yang di dalamnya menjelaskan tentang gambaran umum dari lokasi penelitian yang berada di wilayah lembaga pendidikan serta menganalisis dari data yang didapat dari lapangan.

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menyajikan dan menganalisis data yang didalamnya menjelaskan tentang penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan kesimpulan akhir yang penulis peroleh dari penelitian ini. Sehingga dengan kesimpulan tersebut penulis dapat mengetahui bagaimanakah " Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam di SMA Muhammadiyah 3 Surabaya ".